

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Persidangan Secara Elektronik**

Kasus penyelidikan dan penyidikan perkara yang ditangani kepolisian dalam pelimpahan berkas secara *online* bisa dipercepat, yang tadinya menghabiskan waktu selama maksimal 21 hari, bagi pihak kepolisian dalam pelimpahan berkas perkara bisa saja dipercepat, sesuai prosedur yang diambil. Berkas perkara masuk ke persidangan sudah lebih dahulu dan lebih cepat pengurusannya sesuai yang sudah diatur. BAP (Berkas Acara Penyidikan) yang rampung dan lengkap diserahkan dengan sistem pendaftaran elektronik akan memudahkan kasu kategori perkara. Lama tidaknya pemeriksaan perkara juga tergantung tenaga waktu kesiapan semua petugas pengadilan, terutama jaksa dan hakim yang melaksanakan persidangan perkara tersebut.

Cepatnya proses administrasi secara *online* lebih berguna dan efektif penyelesaiannya, mengingat berkas secara elektronik ditransfer via-data ke pusat pangkalan data yang dimiliki masing-masing pengadilan. Persoalannya perangkat pendukung di masing-masing Kapolsek berbeda tangkapan kekuatan sinyal penerima dan pengirim data. Untuk pemberkasan perkara penyelesaian pendaftaran sidang diperlukan data lengkap supaya tidak bolak balik pengirimannya, jadi benar-benar lengkap semua berkasnya.

Tradisi prosedur pemberkasan secara *online* memang dalam sidang

pengadilan dimulai sejak masa pandemi Covid-19 ini terjadi. Sesuatu yang baru biasanya perlu beradaptasi terhadap kesesuaian terhadap kebiasaan yang dilakukan, karenanya prosedur pendaftaran sidang *online* inipun dilakukan awal-awalnya cukup merepotkan mengingat belum terbiasa dilakukan oleh mereka yang berperkara. Namun lambat laun dianggap lebih mudah tahapan-tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di dalam menjalani serangkaian proses persidangan *online*. Dengan adanya proses administrasi *online* menjadi langkah baru perombakan tata cara sistem peradilan nantinya ke depan.

Seperti yang ditetapkan pada PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara *online* dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut<sup>1</sup>:

#### 1. Persiapan Persidangan

Sebelum persidangan dimulai, panitera/panitera pengganti memeriksa kembali kesiapan para pihak yang berhadir serta melaporkan kepada hakim/majelis hakim. Dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berhadir di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya. Ruangan tempat terdakwa mengikuti sidang elektronik hanya dihadiri oleh terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan/lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 Tentang “*Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik*”

Selain itu, ruangan tersebut juga harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang mampu menunjukkan keadaan ruangan secara umum.

## 2. Dakwaan dan Keberatan

Dokumen Keberatan dikirim ke hakim/majelis hakim dan berkasnya diteruskan ke kejaksaan, dengan ketentuan berkas tersebut dalam format portable document (PDF) yang dikirim ke alamat email pengadilan sebelum dikirimkan. Harus dibaca dan harus diverifikasi antara membaca dan mengunduh. Surat keterangan kejaksaan atas keberatan/eksepsi terdakwa disampaikan kepada hakim/panitia hakim sebagaimana tersebut di atas.

## 3. Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Namun untuk keadaan tertentu, hakim/majelis hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang berada di:

- a. kantor penuntut dalam daerah hukumnya;
- b. pengadilan tempat saksi/ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara;
- c. kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan atau rekomendasi menteri luar negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri; atau
- d. tempat lain yang ditentukan oleh hakim/majelis hakim.

#### 4. Pemeriksaan Terdakwa

Dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik:

- a. terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum;
- b. terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, didengar keterangannya dari kantor penuntut; atau
- c. apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim/majelis hakim melalui penetapan.

Bagi terdakwa yang tidak ditahan, ketua/kepala pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 orang hakim dan 1 orang panitera/panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan terdakwa.

#### 5. Pemeriksaan Barang Bukti

Dalam persidangan elektronik, barang bukti yang diperiksa tetap berada di Kejaksaan, dimana Kejaksaan menunjukkan barang bukti tersebut kepada hakim/majelis hakim secara elektronik.

Jika alat bukti berupa dokumen tercetak, hakim/majelis hakim menggabungkan scan dokumen dalam berkas dengan dokumen asli yang

disampaikan secara elektronik oleh penuntut. Namun, jika bukti tersebut bukan dokumen cetak, maka bukti tersebut dapat difoto/divideokan dan dikirim ke alamat email pengadilan sebelum diajukan sebagai bukti. Jika terdakwa mengajukan bukti-bukti yang meringankan, baik dalam bentuk cetakan maupun dokumen lainnya, maka barang bukti tersebut diperlakukan sama seperti di atas. Hakim/panitia hakim akan menggabungkan alat bukti elektronik yang diajukan dengan aslinya.

#### 6. Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik

Dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dikirim ke alamat pos-el pengadilan sebelum dibacakan oleh hakim, serta setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat pos-el penuntut/terdakwa dan/atau penasihat hukum.

#### 7. Putusan dan Pemberitahuan Putusan

Pada prinsipnya putusan diumumkan oleh hakim/majelis hakim dalam sidang umum yang dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa/pengacara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam keadaan tertentu, berdasarkan keputusan hakim/komite hakim, sidang dapat dilakukan secara elektronik untuk mengumumkan keputusan. Jika terdakwa tidak hadir pada sidang putusan, pengadilan memberitahukan putusan kepada terdakwa melalui alamat elektronik, email, alamat WhatsApp atau SMS.

Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sidang pidana secara elektronik adalah:

- a. Semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.

- b. Panitera/panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksi dengan peserta sidang kepada hakim/majelis hakim.
- c. Hakim, panitera/panitera pengganti, penuntut, dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.
- d. Setiap dokumen elektronik yang disampaikan penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk portable document format (PDF).<sup>2</sup>

## **B. Hasil Wawancara dan Penyajian Kasus**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung terhadap informan ini akan diuraikan sebagai berikut:

### **1) Uraian Hasil Wawancara**

Nama	: Ibu Annisa
Umur	: 33 Tahun
Jabatan	: Hakim Pratama
Pendidikan terakhir	: S1 Hukum
Lama berdinis	: April 2020 s/d Sekarang

Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan perintah baru yang mewajibkan pengadilan negeri untuk menangani persidangan secara elektronik, pengadilan negeri di luar negeri telah mencoba untuk menangani persidangan pidana secara

---

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-sidang-pidana-secara-elektroniklt5f96c0175830d> Diakses pada 20 Desember 2022 pukul 11.00 WITA

online. Proses persidangan perkara pidana di masa pandemi juga harus dilakukan secara elektronik. Namun dalam prakteknya menimbulkan masalah atau hambatan karena tidak diatur.

Sidang pidana online di pengadilan nampak gagap. Hal ini mempersulit korban atau pelaku untuk hadir di pengadilan. Koneksi internet lambat dan sering terputus selama percobaan, termasuk di lokasi terpencil, yang sering membuat percobaan tidak berjalan lancar. Tidak semua pihak yang terlibat dalam persidangan berada di satu tempat, ada beberapa tempat yang akses internetnya sulit. Selain itu, ketersediaan (HR) perangkat atau aplikasi dalam uji coba online belum tentu sama di semua wilayah.

Persidangan elektronik dilakukan menggunakan aplikasi Zoom meeting dan juga Google meeting, video call WhatAspp tidak digunakan karena dianggap lebih sulit dan kualitas gambarnya tidak terlalu jelas. Lokasi tersangka atau saksi tidak bisa langsung diakses melalui zoom teleconference. Hal ini tentu saja dapat menghambat kemampuan kejaksaan maupun hakim dan penasehat hukum untuk mengetahui fakta yang sebenarnya. Belum lagi bukti-bukti yang terkadang tidak mungkin didapatkan secara detail. Majelis hakim kesulitan mendapatkan bukti berdasarkan kesaksian terdakwa atau karena pengadilan tidak mengetahui di balik rekaman apakah terdakwa ditekan atau dipaksa untuk menjawab pertanyaan yang mungkin dia jawab secara tidak jujur. Jadi tidak seobjektif penilaian langsung. Selama dua tahun terakhir, sebagai lembaga hukum, kami telah terbiasa dengan prosedur persidangan elektronik.

Meskipun awalnya sulit, karena saya bisa beradaptasi dengan reformasi

yang proses persidangnya dilakukan secara elektronik, prosesnya tetap berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam kasus pidana.<sup>3</sup>

## 2) Kasus Pencurian Ringan dan Langkah Persidangannya

Tabel 4. 1Gambaran Keseluruhan Waktu Persidangan

No	Kategori Efektivitas Waktu Sidang	Frekuensi	Jumlah
1	Lama Sidang dalam Durasi Waktu 1-2 kali	120 Menit Tercepat	50 %
2	Ada 10 Kasus Sidang	180 Menit	25 %
3	Sidang menghabiskan waktu 3 Jam 5 kasus	1200 menit	20 %
4	Sidang 5 Kasus Terlama	20 Jam	5%
			100 %

Berdasarkan waktu terlama sidang, tentu diukur menit dalam durasi volume lama tidaknya, maka terlama ada 25 % yang dianggap sasaran ketepatan pelaksanaan sidang tidak efektif, walaupun demikian faktor pendukung efektif sidang masih ada sekitar 50 %, selama 120 menit<sup>4</sup> persidangan berlangsung sudah ada agenda kepastian pembacaan gugatan jaksa dan sanggahan-sanggahan tidak

<sup>3</sup> Ibu Annisa, Hakim Pengadilan Negeri Rantau, *Wawancara Pribadi*, Rantau, 22 Juli 2022 Pukul 10.30

<sup>4</sup> <https://www.sipp.pn-rantau.go.id/> Diakses pada 5 Juli 2022 Pukul 09.00 WITA



memungkinkan sidang lanjutannya hanya penetapannya yang biasa berjalan sekitar setengah jam pembacaan keputusan hukum yang berkekuatan, yang apabila si terdakwa menerima saja keputusan Majelis Hakim dan atas tuntutan Jaksa yang dianggap sesuai saja, maka akan dipastikan keputusan Majelis Hakim bisa diterima oleh terdakwa. Maka setiap keputusan yang cepat dalam ukuran baik waktu setiap kali sidang maupun setiap proses tenggang waktu pembelaan sela dalam keputusan, maka dari sisi durasi waktu dianggap efektif cepat dan memuluskan setiap proses persidangan. Sedangkan si terdakwa itu sendiri memastikan dengan pasrah menerima setiap keputusan hakim dan Majelis Hakim.

Pembahasan berikutnya, penyajian data penelitian dalam bentuk tabulasi data berdasarkan kasus yang diteliti.

### 3) Efektivitas Bukti Faktual Persidangan kasus pencurian sembako

*Tabel 4. 2 Sidang Online Pencurian dan Kekerasan*

No	Kategori	Frekuensi Sidang	Jumlah
1	Pencurian Kendaraan 10 kasus	3-5	50 %
2	Pencurian Perampasan Hp 3 Kasus	5-6	15 %
3	Pencurian Alat Rumah Tangga 7 kasus	3	15 %
			F = 100 %

Dengan gambaran persidangan diambil berdasarkan jumlah volume kasus dilihat pada posisi jumlah kasus ringan dalam tindak pidana, tetap saja prosedur

sidang dijalani sampai tiga kali <sup>5</sup>atau lebih menunjukkan bahwa walaupun *online* dilakukan, Majelis hakim tetap mengagendakan persidangan sesuai aturan dalam membuktikan kelengkapan bukti fakta dan perlengkapan pendukung yang mempunyai kekuatan hukum dalam persidangan. Jumlah persidangan tetap memikirkan aspek pembelaan dalam setiap keputusan majelis hakim baru selesai sebuah keputusan perkara. Dan persidangan yang diselesaikan secara tepat waktu dan tidak berlarut-larut maka dapat dikatakan efektif.

#### 4) Efektivitas Bukti Faktual Persidangan Kasus Perjudian

Tabel 4. 3 Persidangan Kasus Perjudian Online, Game, Buntut, dan Gable (Domino)

NO.	URAIAN KATEGORI	FREKUENSI	JUMLAH
1	2 Kasus Ringan	6 x Sidang	18 %
2	1 Kasus sedang	4 x sidang	2 %
3	1 Kasus berat Pelaksana /Penyedia	7 x sidang	2%
4	1 Sangat Berat (Bandar <i>online</i> )	4 x sidang	2 %
5	2 Judi Dado Gaplek	5 x sidang	4 %
6	4 Judi Domino Basangaan	2 x sidang	8 %
7	4 Judi Game buntut <i>Online</i>	3 x sidang	8%
8	Judi buntut lokal	1x sidang	4%
9	Judi sabung ayam	1 x sidang	4 %
10	Judi Judi Poker	1 x sidang	4 %
11	Judi 41 Remi	1 x sidang	4 %

<sup>5</sup> <https://www.sipp.pn-rantau.go.id/> Diakses pada 5 Juli 2022 Pukul 09.00 WITA

12	Judi Dado Lenggang 4	2 x sidang	16 %
13	Judi Tebak angka ekor pacuan kuda 7 kasus	3 x sidang	28 %
		Kategori Waktu Sidang 1,2 dan 3 Kali yang cepat	FN : 100 %

Persidangan masalah judi *online* dan *offline* dianggap sebagai kasus umum, namun jarang dijadikan masalah, disini peneliti ambil karena dari sisi prosedur dan tata cara sidang paling nyaman. Bisa cepat tuntas dan tidak memerlukan saksi-cukup alat bukti data atau fakta temuan seperti perangkat laptop, HP dan bukti transaksi. Sama yang terjadi *offline*, kalau digrebek ada main judi dan ada alat bukti maka memungkinkan kasus cepat selesai, kalau efektif dua kali sidang sudah selesai tuntas.

Dua kali sidang dengan durasi waktu 2 atau 3 jam sudah efektif dalam pergelaran sidang kasus pidana biasa. Di sisi lain perjudian terutama di wilayah pegunungan dalam yang jauh dari jangkauan aparat sangat semarak di kampung, dengan istilah lain di wilayah pendulangan, di wilayah hutan penebangan kayu, karena mencari uang lebih mudah, jadi sebagai hiburan kehidupan anak-anak muda dengan maraknya melakukan perjudian.

Dilihat distribusi data keseluruhan populasi dan sampel yang diambil sebenarnya persoalan termasuk pekat (penyakit masyarakat, apalagi di daerah perkotaan, Jadi wajar sudah sejak dahulu Era Orde Baru bahkan mungkin sejak

zaman Belanda perjudian seperti sabung ayam di kalangan awam bahkan kelompok ningrat dianggap hal biasa bahkan jadi ajang taruhan besar-besaran.

Permasalahan dilihat dalam konteks distribusi persidangan digitalnya, yang sebagai persidangan cepat dan dipercepat, kendati perjudian masuk pada dunia maya, dan di daerah terpencil pas ditemukan saat razia petugas. Persidangan satu sampai dua kali bahkan tiga kali dalam konteks percepatan sidang dianggap cepat dan efektif.

#### 5) Efektivitas Bukti Faktual Persidangan Kasus Perampokan

*Tabel 4. 4 Kasus Perampokan Toko/Pedagang Emas*

NO.	URAIAN KATEGORI KASUS	FREKUENSI	JUMLAH
1	Kasus Perampokan Emas	3 Kali	100 %
2	Ada barang bukti		
3	Ada saksi memberatkan		
4	Tidak mempersulit persidangan		
5	Tidak memerlukan pengacara		
6	Hukuman diterima		
7	Tuntutan jaksa sesuai pasal dgn hakim		
		F= Cepat 7 Butir bukti item Materal persidangan	F/N = 100

Ada enam item bukti penguat persidangan dalam tiga kali agenda sidang,<sup>6</sup> kualitas kasus bukti penguat kasus mempercepat sidang karena fakta dan data

<sup>6</sup> <https://www.sipp.pn-rantau.go.id/> Diakses pada 5 Juli 2022 Pukul 09.00 WITA

pendukung persidangan setiap kasus yang cepat itu karena tidak ada celah keterlambatan prosesi sidang dijalankan. Dengan hanya melaksanakan tiga agenda sidang maka dianggap efektif.

#### 6) Efektivitas Bukti Faktual Persidangan kasus pencurian sembako

Tabel 4. 5 Kasus Perampokan Toko Sembako

NO.	URAIAN KATEGORI KASUS	FREKUENSI	JUMLAH
1	Kasus Perampokan Toko Sembako1	3 Kali	100 %
1.1	Ada barang bukti		
1.2	Ada saksi		
1.3	Tidak mempersulit persidangan		
1.4	Tidak memerlukan pengacara		
1.5	Hukuman diterima		
1.6	Tuntutan jaksa sesuai pasal dgn hakim		
1.7	Proses jalan persidangan efektif		
1.8	Tertangkap saat beraksi		
		F= Cepat 8 Bukti item faktual persidangan	F/N = 100

Efektivitas persidangan bukti kedua dalam kaitan jumlah daya pendukung isi material persidangan, seperti; ada barang bukti, korban, ada saksi dua orang, tidak, penetapan hukuman sesuai pasal yang didakwakan, si terdakwa tidak pikir-pikir dan menerima apa adanya atas asas pasal yang diterapkan, prosesi sidang

berjalan lancar lancar, akurat, maksimal, dan daya penjelasan tak terbantahkan, serta penguat alat bukti tertangkap basah saat persidangan. Ada delapan item tambahan persiapan sidang yang efektif dari segi faktual hukum dan litigasi hukum, maka sangat efektif prosesi sidang *online* daripada sidang *offline*.

### 7) Efektivitas Bukti Faktual Persidangan Kasus Pemerkosaan

Tabel 4. 6 *Pemerkosaan dan Tindak Kekerasan Seksual*

NO.	URAIAN KATEGORI	FREKUENSI	JUMLAH
1	1 Kasus Tindak Pidana Berat	6 kali sidang	100 %
2	Perlu rekonstruksi		
3	Perlu pengacara		
4	Perlu kelengkapan alat bukti		
5	Perlu saksi-saksi		
6	Tuntutan jaksa berat		
7	Terpidana tidak terima putusan berat		
8	Mempersulit persidangan		
9	Berupaya menyuap jaksa atau hakim		
11	Pasal yang dipersangkakan lepas		
12	Mangkir sidang		
13	Pengacara tidak terima		
14	Masa hukuman terlalu lama dan berat		
		F= 6 Kali Selesai Proses jalan sidang lambat/sedang 13 item prosesi	F/N = 100 %

		penguat efektitivitas bukti tambahan material	
--	--	---	--

Faktor kelemahan persidangan elektronik adalah pada komunikasi psikologis antara jaksa, hakim pengacara dengan si terdakwa. Seandainya berpijak pada kasus murni hukum saja, maka persidangan online sebenarnya sangat berpengaruh kepada makna filosofis hukum persidangan. Ada 13 item<sup>7</sup> yang bisa saja menghambat jalannya efektivitas persidangan. Apalagi kasus perkosaan, karena alat bukti wajib ada uji kekerasan fisik seksual, ada memar pukulan, dll. Semua diperlukan tambahan uji di luar alat persidangan, namun tetap saja melekat sebagai bukti faktual persidangan, apalagi saksi kunci tidak bisa dihadirkan.

Kasus terjadi lamanya sidang lain membat gangguan tidak efektif karena pengacara berpegang teguh kepada saksi kunci dan uji material laboratorium kriminal. Sebenarnya tiga kali persidangan pun bisa selesai, karena pembacaan obyek kasus perkara yang dilengkapi kesempurnaan berita acara akan mempercepat proses efektivitas persidangan.

Proses sidang baik konvensional maupun elektronik, bisa juga dianggap efektif pada banyak sisi, namun apabila sidang itu lambat, secara online. Bukan berarti tidak efektif, karena ada sesi persidangan yang mangkir, tidak dihadiri terdakwa. Selain itu biasanya ada pengacara yang mendamping selaku kuasa hukum yang berusaha mencari alibi dan jalan untuk meringankan hukuman namun memperlambat proses jumlah durasi persidangan, namun dari sisi volume dan

---

<sup>7</sup> <https://www.sipp.pn-rantau.go.id/> Diakses pada 6 Juli 2022 Pukul 10.00 WITA

posisi putusan bisa saja efektif, karena pasal yang diterapkan sudah tepat. Tapi dalam kasus kekerasan seksual apalagi pemerkosaan, kekuarangan alat bukti dan saksi ditambah lagi harus ada visum laboratoriom kalau kasus berat apalagi pemerkosaan.

#### 8) Efektivitas dari Sisi dua Alat Bukti Kasus Korupsi

*Tabel 4. 7 Kasus Korupsi Dana Desa*

NO.	URAIAN KATEGORI KORUPSI	FREKUENSI	JUMLAH
1	Kasus 3 orang Aparat Desa	3 Kali	100 %
1.1	Ada barang bukti		
1.2	Ada saksi memberatkan		
1.3	Tidak mempersulit persidangan		
1.4	Tidak memerlukan pengacara		
1.5	Hukuman diterima		
1.6	Tuntutan jaksa sesuai pasal dgn hakim		
1.7	Proses jalan persidangan efektif		
1.8	Dampingan pengacara		
		F= Cepat	F/N = 100

Perbedaan kunci apabila kasus korupsi di tari kepersidangan pidana umum, sementara undang-undang KPK dan Undang-2 Tipikor diterapkan, maka kasus persidangan itu sebenarnya dua alat bukti sudah efektif untuk menjerat koruptor dalam menjalani hukum baik pidana khusus apalagi pidana umum. Karena kasus tertangkap tangannya bukan oleh KPK, maka dikonversi ke persidangan pidana umum lebih memudahkan untuk prosesi pembuktian terbalik (alat bukti nyata yang dimiliki oleh jaksa dan polisi, menjadi dua alat bukti untuk pidana umum pun



sebenarnya sudah dapat menerapkan pasal-pasal perundangan korupsi atau pidana umum yang lain. Tambahannya apalagi ada alat bukti lain penguat. Untuk kasus alat bukti dalam kategori satu kasus dengan tiga tindak pidananya, maka 100% data bisa mewakili faktual hukum tentang alat bukti minimal 2 sudah jadi pembuktian terbalik. Apalagi tertangkap faktual menyuap, uang free(imbalan proyek) dll, sudah dapat dikategorikan kasus sangat efektif dalam posisi di sidang digital.

Kasus-kasus korupsi dana desa hampir dimana2 terjadi namun jarang muncul ke permukaan karena diselesaikan secara (adat) birokrasi atau ada unsur kesengajaan menutupi karena melibatkan banyak pihak. Namun kalau sampai muncul, biasanya tidak heboh dan sidang *online*, paling efektif dari sisi publikasi dan transparansi, serta administratif. Apalagi secara prosentasi durasi waktu, kalau bisa satu kali sudah diputusan, namun karena ada pengacara, maka pengacara kadangkala mengadakan aspek mediasi atau “berdamai dengan pasal memberatkan”.

### 9) Efektivitas Sidang dengan Tidak Hadirnya Pengacara

Tabel 4. 8 Kasus Perampokan Kendaraan Roda 2

NO.	URAIAN KATEGORI KASUS	FREKUENSI	JUMLAH
1	Kasus Perampokan Kendaraan	3 Kali	100 %
1.1	Ada barang bukti		
1.2	Ada saksi memberatkan		
1.3	Tidak mempersulit persidangan		

1.4	Tidak memerlukan pengacara		
1.5	Hukuman diterima		
1.6	Tuntutan jaksa sesuai pasal dgn hakim		
1.7	Proses jalan persidangan efektif		
1.8	Tidak ada pendampingan pengacara		
		F= Cepat Ada 8 item penguat efektif sidang online	F/N = 100

Kasus perampokan sering terjadi terutama jalan yang sepi penduduk, biasanya dalam sidang *online* dengan alat bukti dan saksi yang memberatkan efektivitas persidangan berjalan lancar karena terdakwa juga selalu mentaati aturan sidang dan tidak terlalu mempersulit sidang.

Setiap kategori kasus, efektivitas persidangan *online* terjadi tiga kali sidang dianggap Sangat Efektif (SE), kata kunci ada pada selain alat bukti, juga karena tidak ada pengacara yang mempersulit berargumentasi, mengutak-atik pasal, serta menyeret pasal-pasal tidak relevan, yang membuat persidangan alot. Sedangkan dalam konteks kasus sidang digital, semakin tidak ada perbantangan dan bahkan semain tida ada pengacara, maka persidangan akan berjalan efektif. Rumus Kasus, persidangan apabila ada penguatan efektivitas dalam prosesi, apalagi cepat, tepat, secara waktu material dan immaterial, maka sidang itu dianggap efektif. Jumlah proses sidang walaupun tiga kali, namun percepat durasi, daya energi argumentasi

hanya ada pada penuntut dalam hal ini jaksa, maka hakim yang menganalisis penerapan pasal yang dipersangkakan jaksa, tepat sasaran, dan tidak ada perbantahan pengacara dengan jaksa, dan pengacara dengan hakim, apalagi keebertan terdakwa, muncul karena olah pengacara, maka dari sisi ketidakhadiran dianggap sidang itu efektif.

#### 10) Efektivitas Persidangan dari sisi Saksi Kunci yang Netral

Tabel 4. 9 Sidang Laka Lantas Pemberatan

NO.	URAIAN KATEGORI	FREKUENSI	JUMLAH
1	Kasus Laka Lantas Pemberatan	2 Kali Sidang	100 %
1.1	Kasus sidang cepat tepat sasaran		
1.2	Saksi-saksi netral		
1.3	Terpidana menerima putusan hukuman pasrah		
		F= Sangat Cepat Ada Saksi kunci Netral	F/N = 100 %

Kasus sidang *online*, dianggap efektif manakala saksi-saksi yang terkait dengan laka lantas itu mulus, dan posisi penerapan pasal dianggap oleh saksi kunci atau saksi ahli meringankan posisi terdakwa, maka saksi berperan aktif dalam persidangan *online*. Faktor diperkuat bahwa kecelakaan Lalu lintas apabila tidak berdamai, maka kasus tindak pidana peradilannya ada pada saksi ahli atau saksi kunci yang sudah menegosiasikan dengan korban LAKALANTAS-nya untuk mendapat percepatan persidangan, apaakah dari sisi pidana atau perdata, menggugurkan hak perdata itu lah naik ke tingkat pidana. Sasi ahli yang

membeberkan faktor faktual kemanusiaan, masalah agama dan takdir dianggap bagian penerahan meempermulus kungsi seelesai cepat persidangan. 100 % fakta sidang sebagai kateogri kasus, karena haanya satu kasus yang diamati terekam sebagai bkti selesai persidangan. Karena mewakili satu kasus yang efekti dari sisi kassitik maka, rumus frekeuensi Sangat Tepat =ST atau Sangat Sesuai= SS.

Kasus sidang Kecelakaan lalu lintas sering terjadi, apabila tidak ada mediasi, maka cenderung dialihkan ke ranah pidana, terutama seberapa jauh ada unsur idana, kaalau kecelakaan faktor yang memperkuat terjadi tindak pidana, seperti melarian diri, namuan daat ditemukan, oleh polisi terhadap pelanggar lalu lintas yang tabrak lari. Persidangan seperti ini cenderung cepat, lancar, dan tidak terlalu rumit, walaupun pasal pidana, misalnya korban tabrak lari mengalami cacat fisik dan lain-lain.

### 11) Efektivitas Persidangan Digital Dari kategori Nilai Kasus Kerugian

*Tabel 4. 10 Kasus Pencurian Sarang Burung Walet*

NO.	URAIAN KATEGORI	FREKUENSI	JUMLAH
1	Pencuri Sarang burung Walet orang ke 1orang dan orang ke 2	3 Kali Sidang	40 %
2	Pencuri S.Walet Ke 3, 4, 5 Pemberatan	2 Kali sidang	60 %
1.2.1	Tertangkap basah/Alat bukti kuat		
1.2.2	Terpidana pasrah		
1.2.3	Hukuman standar		
1.2.4	Penerapan pasal tepat sasaran		

	fokus		
1.2.5	Besarnya Kerugian Material dan Moral		
		F= Sangat Cepat Sisi Pemberatan Kerugian Material	F/N =100 %

Kasus pencurian sarang burung walet sering terjadi, kalau penjagaan lengah. Apalagi kasus pidananya kalau tertangkap saat beraksi, maka sidang akan berjalan lancar dan tidak berbelit-belit. Pencurian sarang burung walet yang dicuri milik pejabat, maka proses hukum dan persidannya tidak menghabiskan waktu lama dan lancar.

Kunci penyelesaian pada makna kerugian material sampai milyaran rupiah dalam posisi harga dan jumlah nilai kilogram sarang yang dicuri. Contoh satu kilogram adalah Rp. 7.000.000, yang super plus, putih mulus berbentuk mangkok. Dikalikan 7.000.000 x 200 Kg, berarti dana yang dicuri kalau diuangkan sama dengan Rp. 1.400.000.000. Belum kerugian immaterial, dampak moral, kasus Sarang Burung Bupati atau milik keluarga bupati yang dicuri, tentu lebih berat lagi hukumannya. Walaupun ini kasuistik, atau kasus langka. Namun pada terjadinya penelitian ini, kasus sudah terjadi sebagai dampak masa Covid-19, namun dari isi pemberatan alat bukti material akan membuat sidang bisa efektif. Dari makna tujuan hukum dan asas keadilan yuridis ligitasi huum formal material. Sementara dalam kategori prosentasi 100%, karena termasuk kasus tunggal yang mewakili makna efektivitas durasi jumlah jam sidang pada session sidangnya. Sementara sisi objek huum materialnya pada dimensi pemberatan makna kerugian. Jadi sisi distribusi

kasuistiknya, membuat daya sidang bisa sangat efektif. (rumus sidang 1-3 kali Sangat <sup>8</sup>Sesuai (SS) dan Sangat Efektif (SE).

### 11. Efektivitas Sidang Digital Dampak Penjeraan Kasus

Tabel 4. 11 Kasus Membawa Sajam dan Pemberatan

NO.	URAIAN KATEGORI	FREKUENSI	JUMLAH
1	Pembawa sajam dan pemberatan Tanpa Ijin <sup>9</sup>	3 Kali Sidang	40 %
2	Pembawa sajam ringan berkebun	2 Kali sidang	60 %
3	Tertangkap basah/Alat bukti kuat		
4	Terpidana pasrah		
5	Hukuman standar		
6	Penerapan pasal tepat sasaran fokus		
7	Terdakwa tidak tahu membawa senjata tajam wajib berijin		
8	Efek Jera Kasus		
		F= Sangat Cepat Efek Jera Kasus kunci Faktual	F/N =100 %

Kasus pidana pembawa senjata tajam untuk wilayah rantau paling sering terjaai, dan sebagian besar merupakan kasus ketidaktahuan penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Hukuman pemberatan sampai 5 tahun, namun kalau sajam

<sup>8</sup> <https://www.sipp.pn-rantau.go.id/> Diakses pada 5 Juli 2022 Pukul 09.00 WITA

<sup>9</sup> <https://www.sipp.pn-rantau.go.id/> Diakses pada 5 Juli 2022 Pukul 09.00 WITA

hanya untuk ke kebun dan lain-lain, itu tentunya dianggap sebagai pidana ringan saja paling lama tiga bulan atau hukuman bersyarat dan tahanan rumah atau denda uang.

Kasus membawa senjata tajam, adalah kasus yang sangat sering terjadi. Namun ketidak kurangnya pengetahuan warga berdampak pidana. Mengapa dimunculkan dalam kasus penelitian? Karena selain merupakan kasus budaya etnis yang menjadi bagian ketidaktahuan masyarakat, juga sebagai pengimbang efek jera “pembelajaran” kepada masyarakat. Boleh membawa senjata tajam berkebun dengan persyaratan, senjata disembunyikan aman di dalam jok kendaraan, kendaraan diberikan pengamanan khusus disembunyikan. Tidak harus petenteng-petenteng, ata malah dipamerkan. Efek jera kepada masyarakat itulah yang menjadi ranah pidana umum. Walaupn demikian, semasa sidang digital, dampak efektivitas jera itu, menjai pembelajaran ampuh kepada masyarakat sebagai proses sosialisasi hukum dan penyadaran hukum (Sadarkum) di tengah masyarakat yang *notabene* sebagai warisan budaya pedalaman dan wilayah etnis daerah Kadangan dan Rantau.

Prosentasi kasus dengan item penguat efek jera sebagai butir kasus ada dua nilai distribusi persidangan ada dua kategori sidang pertama 2 kali dihitung 40 prosentasi dari sampel tetap perkasus .dari dua item setiap kasus sidang. Tiga kali dianggap mewakili dari per-20 prosentasi masing-masing sidang. Sidang efek jera, hanya dalam konteks budaya etnis. Pengambilan data kasus muncul sempalan (duplikat kasus, kalau ada kasus serupa). Sisi efek jera dalam edah kasus sangat langka terjadi<sup>10</sup> Perwakilan kasus efek jera, disertakan untuk menyaksikan bahwa

---

<sup>10</sup> Bapak Utuh Macal, *Wawancara Pribadi* pada tanggal 23 September 2021.

tidak pidana yang selalu terulang dengan tingkat efektivitas sidang bahkan di bawah 3 kali atau 1 kali sidang seharusnya itu yang terjadi dalam makna ekuatam tertinggi proses hukum persidang baik sidang konvensional maupun sidang digital. Substansi pemberatan efek jera, merupakan sosialisasi budaya. Jadi satu kali sidang untuk membuktikan efektivitas persidangan menjadi bagian penting secara logika hukum. Seandainya dalam sidang digital terjadi satu kali persidang langsung klar jelas, maka rumus itu sesuai dengan terapan apabila persidangan hanya terjadi 1-3kali dianggap sangat efektif. SS (sangat Sesuai dan Sangat Efektif).

#### 12) Efektivitas Sidang Digital dalam Konteks Yuridis Penerapan UU dan Pasal Tepat Sasaran

Tabel 4. 12 Pemerksaan Pemberatan Pembunuhan

NO.	URAIAN KATEGORI	FREKUENSI	JUMLAH
1	Kasus Pemberkosaan Pembunuhan	3 Kali Sidang	100 %
1.1	Alat bukti sangat kuat	Sangat lengkap	
1.2	Saksi Memberatkan	Lengkap	
1.3	Terpidana pasrah	Setuju	
1.4	Penerapan pasal efektif	Sangat pas	
1.5	Hukuman standar	Sangat sesuai	
		F= Sangat Cepat Efektivitas Pasal yang diterapkan	N= -100 %

Pasal pidana yang diterapkan dalam kasus pembunuhan ditambah pemerksaan dengan pasal berlapis, pemberatan dalam kasus ini dari sisi



persidangan 1-3 dianggap Sangat Sesuai (SS) dan dari sisi efektivitas memenuhi unsur kategori Sangat Efektif (SE). Begitu juga durasi waktu dengan ketepatan penerapan pasal berlapis sesuai ranah pidana pembunuhan ditambah alat bukti pemerkosaan pemberatan, yang hukumannya di atas 15 tahun, dianggap sisi efektivitas pada penerapan pasalnya.

Kasus pidana pemerkosaan percobaan pembunuhan berencana kalau cukup alat bukti dan saksi dan terdakwa mengakui secara jujur akan memudahkan persidangan. Tapi kalau tidak mengakui dan saksi kurang menyakinkan, maka sidang menghabiskan waktu yang lama. Dalam kasus sampel ini dianggap sangat cepat proses persidangan yang berjalan. Kasus ini, merupakan kasus tunggal, dan setiap kali sidang hanya membutuhkan waktu satu jam, pembacaan delik tuduhan tuntutan jaksa, dan reflek jeda putusan sela pengadilan kajian hakim dan penguatan, disertai putusan sela ketetapan kepastian hukum. Kesertaan kelengkapan peradilan yang sangat cukup dan tidak ada sanggahan meringankan, maka membuat kasus persidangan sangat efektif, dalam kasus tunggal mewakili nilai kasus (1 kasus) tunggal sama dengan dengan N=100% full, namun kalau pembagi dari 10 kasus (Regresi=perwakilan distribusi per-10 kasus), maka makna 100% menjadi 10 % karena tidak ada kasus lain yang setara baik dari segi formalitas material hukum kasus, maupun penerapan pasal kasus yang setara.

### 13) Efektivitas Sidang Digital dari Sisi Keamanan dan Kenyaman Kasus

*Tabel 4. 13 Pembunuhan Massal dan Penganiayaan Tidak Berencana*

NO.	URAIAN KATEGORI	FREKUENSI	JUMLAH
1	Lima Orang Kasus yang bersamaan Pembunuhan Penganiayaan	3 Kali sidang plus Reka adegan	100 %

1.1.	Kasus Pemberatan	Sangat Sesuai	
1.2.	Saksi dihadirkan	Lengkap	
1.3.	Pasal sesuai	Fokus jitu	
1.4.	Pasrah	Sangat setuju	
1.5	Tidak mempersulit persidangan	Jujur	
1.6.	Reka adegan sesuai kasus	Sangat pas	
1.6	Keamanan Kasus dan Kenyamanan Sidang <i>Online</i>		
		F= Sangat Cepat	F/N = 100 %

Kasus pembunuhan tidak berencana yang lama bukan masala sidangnyanya tapi masalah rekonstruksi dan kelengkapan adegan, alat bukti, saksi-saksi dan kasus pemberatannya. Apalagi banyak sanggahan terdakwa, maka sidang dianggap lama dan menghabiskan waktu panjang. Sementara pasal berlapis yang diterapkan juga memperlambat proses keputusan Hakim yang tidak sinkron antara tuntutan jaksa, putusan hakim dan pembelaan dari pendampingan hukum. Namun kalau semua berjalan lancar, bisa saja sidang terjadi sangat mudah, cepat, lancar dan aman.

Percepatan sidang pembunuha masal tidak berencana, karena adanya pengeroyokan tusngg parkir terhadap pemarkir kendaraan, dianggap selain tidak berencana, spontanitas, dan yang mengeroyok pun banyak lebih dari lima, dengan kasus yang sama, pembunuhan tidak berencana. Dalam kasus lain pencuri yang tertangkap di pasar gunung wilayah Lalapin, jua kasus pembunuhan massal tidak berencana. Proses persidang, karena melibatkan massal pembunuh, namun kalau dilakukan digital maka lebih aman dan lancar. Begitu juga adegan tidak terlalu rumit, karena yang namanya pengeroyokan masalah. Ada yang menggunakan sepak

terjang tendangan, atau bisa jadi pakai kayu, namun beruntung dalam kasus pembunuhan ini tidak dengan senjata tajam. Benar-benar dipukuli dalam kasus langka. Pencurian dompet, dan ketangkap basar. Akhirnya digebukin secara massal, orang puluhan menggebuki encuri dan tidak ada polisi yang meelerai, tentu bisa berakibat nyawa melayang. Dalam aitan hukum penerapan pasal sekaligus keamanan persidangan *online* dianggap efektif.

Makna efektivitas dri sisi durasi digital sidangnya, dengan kelengkapan alat bukti saksi-saksi hukuman yang meringankan, dan terpenting lagi lagi tidak ada tuntutan balik dari korban pengeroyokan. Sisi keamanan sidang digital untuk kasus serupa paling efektif. Efektif dri sisi keamanan (SS=Sangat Sesuai). Efektif dari sisi material kasus massal. 100% frekuensi jumlah per-item kasus dari per-satu kasus khusus mewakili kelangkaan proses sidang itu sendiri dari 10% dari 2 sd.3 kali sidang setiap kasus dijumlahkan dalam perkalian modulus 1 kasus dari per-100%. Menjadi N=100.

Sub-item setiap kasus ada kata kunci efektivitas dari posisi persidngangan digital. Karena mengukur kasus yang sudah terjadi diproses sidang dilapangan, dikuatkan oleh sub-item setiap kunci analisis yang bisa menjadi standar bahasan. Sidang digital dianggap efektif, aapabila dalam konteks pembunuhan massal tidak mengalami tindakan pengacauan, tidak terendali, ada rasa tidak aaaaaman agi pembunuh, ada makna balas dendam, dan lain-lain. Sementara sidang digital ada pembatasan orang, jarak waktu, jarak kerumunan massal, jarak keanaman pendampingan kepolisian dan sebagainya, maka sidang itu dianggap SS (Sngat Sesuai atau SE= sangat Efektif).

#### 14) Efektivitas Sidang Digital dari Aspek Hukuman Berlapis Dan UU Ganda

Tabel 4. 14 Kasus Penambangan Batu Bara Ilegal Pemberatan

NO.	URAIAN KATEGORI	FREKUENSI	JUMLAH
1	Kasus Persidangan Tambang Ilegal	2 Kali Sidang	100 %
1.1	Kecepatan pendaftaran Laporan berkas	3x24 jam	
1.2	Ketepatan pemasangan pasal UU	2 kali perubahan pasal	
1.3	Kelengkapan administrasi prasidang	1 kali pemberkasan	
1.4	Kasus UU Tipikor/Khusus Tambang	1 keistimewaan	
1.5	Alat bukti yang sangat kuat	Lengkap	
		F= Sangat Cepat sekali	F/N = 100 %

Kasus penambangan batu bara yang sering terjadi di wilayah tambang, apalagi daerah binuang dan lokasi tambang lainnya, dengan bahasa lainnya adalah penambang ilegal itu, sebenarnya buan hanya tidak memiliki ijin tambang, tetapi encurian tambang baik yang sudah ada di perusahaan atau menambang milik orang lain. Persoalan penambanangan ilegal di wilayah hukum Kabupaten Tapin, semarak sejak ada pertambangan di sana, namun jarang muncul ke permukaan dan disidangkan oleh polisi karena diselesaikan di luar pengadilan. Namun apabila, tidak diurisi oleh backing atau cukong yang kuat dan beekerjasama dengan perusahaan yang dicuri, itu muncul kasus ke pengadilan. Ini biasa terjadi si penambang ilegal memang tidak punya modal, apalagi penambang karungan, penambang pencuri

dengan modal truk atau pick up, yang mengambil batubara perusahaan dan dijual lagi ke perusahaan lain. Kejadian demikian bisa muncul sebagai tindak pidana umum. Sebagaimana kasus dalam sampel ini.

Efektivitas penerapan sidang ilegal mining, sebenarnya bisa oleh pihak terlibat. Namun aturan pasal berlapis dan undang-undang berlapis persidangan digital dianggap kasus langka dalam tindak pidana umum dimasukkan. Menurut informasi dari kasus orang yang diwawancarai dalam kasus ini, pengungkapan sidang pertambangan dalam konteks pidana umum mewakili kasus langka. Jadi supaya jangan ribut, dan beralih pada penyebaran kasus saling mengkait, maka sidangnya cukup satu atau dua kali saja. Bahasa hukum di lapangan dalam tambang batu bara yang penting ada “tumbal kasus”. Karena dianggap langka, maka satu kasus ini memiliki banyak sub-item penyerta penjabar di dalam butir elemen pembuktian logika hukumnya. Faktualisasi kasus, yang terpenting dimasukkan kategori pidana umum mengingat rumitnya persidangan ini kalau dimasukkan ke tindak pidana tipikor atau akan tindak pidana KPK.

Bukan rahasia umum lagi di lokasi pertambangan seperti di Rantau menjadi kasus gunung es (hanya terlihat di permukaan sebagai pertambangan legal, yang sedikit di puncaknya. Sementara di bawah permukaan sebagian besar ilegal. Mengingat ini banyak terkait dengan hukum bisnis, maka aspek pidana kadangkala diabaikan. Tetapi apabila muncul sebagai kasus, ke permukaan, maka terbilang kasus langka.

Terbilang kasus langka dengan hanya satu kasus yang muncul mewakili 10 kasus sampel, maka tingkat efektivitas sidang, dua kali dalam kategori kasus sangat

efektif atau sama dengan SS=Sangat Sesuai. Sedangkan prosentasi perwakilan setiap sub- item kasus satu-persatu-berada pada posisi 100%, di tingkat pewailan perkalian per-10 kasus. Mengingat kasus tunggal. Sementara tabulasi tunggal disajikan tersendiri, untuk membedakan kategorisasi variabel bebas, setiap kasus, karena memiliki makna tafsiran data tersendiri.

#### 15) Efektivitas Sidang Digital pada Kasus Aspek Dampak Hutan Lindung

Tabel 4. 15 Kasus Penebangan Liar (Illegal Logging)

NO.	URAIAN KATEGORI	FREKUENSI	JUMLAH
1	Kasus Penebangan Kayu Hutan Lindung	2 Sidang	50 %
2	Kasus Penebangan Hutan umum	1 Kali sidang	50 %
3	Kecepatan pendaftaran Laporan berkas	1kali pemberkasan	
4	Ketepatan pemasangan pasal UU	1 keistimewaan	
5	Kelengkapan administrasi prasidang	Lengkap	
6	Kasus UU Tipikor/Khusus Tambang	1 kali pemberkasan	
7	Alat bukti yang kuat	Barang sitaan	
		F= Sangat Cepat	
		Sangat Sesuai	F/N =100 %

Kasus *Illegal Logging* adalah kasus langka, lama dan memberatkan, apalagi dari sisi dampak hutan lindung. Hukumannya di area Pegunungan Mratus, apabila tidak memiliki izin dan menebang di area hutan lindung yang di kenal dengan istilah “paru-paru dunia”, asal memiliki kelengkapan alat bukti lebih dari dua, maka tindak pidana yang diterapkan dengan pasal UU berlapis, UU Lingkungan, UU Lalulintas,

UU habitat Satwa, UU Bisnis dan lain-lain, yang menurut kepolisian ADIRA 88 adalah sebuah lembaga bantuan hukum nasional, bahwa penerapan *illegal logging* sangat berat hukumannya yakni di atas 10 tahun apalagi alat bukti lengkap dan tetangkap tangan saat penebangan, atau membawa kayu hasil penebangan.<sup>11</sup>

Penebangan liar terjadi sebagai kasus pidana umum dalam persidangan, karena penebang liar tanpa izin, menebang hutan lindung hutan produksi dan hutan negara yang tidak ada dokumen perijinannya. Sebagai dalam kasus ini, dianggap sebagai pidana umum dan persidangannya pun cenderung cepat lancar dan tidak berbelit-belit. Munculnya rosentasi persidangan ada 50 proses, dan pada kolom N=Jumlah yang sama, muncul 50 %, mengingat dua kasus sidang dengan dua kasus item sub-sidang, satu persidangan kasus yang sama, ketangkap basah saat penebangan di lokasi hutan. Sementara kasus satunya, saat membawa hasil jarahan kayu dengan angkutan truk penuh di uar ambang batas daya angkut setiap truk maksimal 4 ton, sementara mengangkut lebih 6 ton di hutan di area lindung meratus tanpa disertai dokumen resmi, dokumen yang sangat ketat dari pusat dokumen kepolisian dan perda daerah. Kasus langkanya, karena satu kali sidang sudah selesai putusan tanpa reflesi sidang balik, mengingat prosedur pra-sidang dan paralegal (negosiasi hukuman sebelum lanjut ke persidangan sudah dikonsultasikan dengan kuasa hukum. Yang meringankan adalah sitaan alat bukti kayu, dan denda sidang sebagai kompensasi negara ke kas negara, dan yang meringankan lagi bahwa sat kali sidang, sebagai bagian efektif, adalah bukti penebangan liar menurut gambaran kasus, adalah pada saat “menebang pohon” itu sendiri yang dianggap ilegal, dan

---

<sup>11</sup>Bapak Edy Mubriyanto, Pengurus Pusat Kasus *Iligal logging* dalam pendampingan konsultan hukum di ADIRA 88, *Wawancara Pribadi*. tanggal 12 Desember 2022.

pemanfaatan untuk dijual, sebagai lahan pencarian bisnis. Onstultasi hukum itu lah membuat sidang hanya satu kali dan barang bukti pun sedikit hanya beberap potong yang jadi alat bukti tetap. Secara kesuaian sidang efektif dianggap rumus tetap SS (sangat Sesuai) dan sangat efektif (SE).

### **C. Analisis Efektivitas Terhadap Persidangan Eletronik**

Berdasarkan data yang disajikan, maka bagian analisis ini peneliti menggunakan beberapa kajian berdasarkan bahan simpulan penulis, dan membuat pembahasan umum bahwa ada beberapa langkah analisis logika rasional:

#### **1. Efektivitas Persidangan *Online* Berdasarkan Proses Durasi Waktu**

Pedoman efektivitas dalam kurun waktu sidang antara 1-3 kali persidangan dianggap sebagai sampel 20 kasus dengan varian sub-item butir di dalamnya tergantung isi item yang dimunculkan dalam kasus persidangan *online* yang cepat dan efektif.

Cepat dalam ukuran jumlah perkalian sidang dan prosentasi sidang antara 40-60 persen dari seluruh kasus. Sementara masing-masing kasus, dianggap di atas 75 persen kalau persen persidangan itu hanya memerlukan waktu tertinggi yaitu tiga kali sidang. Sementara yang satu dan dua kali sidang dianggap di atas 80%, dalam kategori frekuensi di atas 80 persen. Dari sisi Median data yang diambil dari keseluruhan persidangan online. Maka termasuk paling dominan sebagai kasus umum maupun kasus angka. Rumus digunakan apabila domain (isi idikator variabel 3-4, maka termasuk SS (sangat sesuai) dan S (sesuai). Sementara dari rosentasi



N=Jumlah prosentasi 80-100 % mendekati jumlah sangat setuju atau sangat efektif (SE).

Jumlah jam sidang kalau dialokasikan menit, maka satu kali sidang minimal 60 menit sd. 180 menit dalam setiap kasus, yang terepat dalam durasi menit, tentu kasus dua kali sidang dalam kurun 1x 60 menit. Dan kendati tiga kali sidang tetap dianggap cepat karena 3x60 menit.

Persidangan yang menghabiskan waktu lama baik dalam kurun waktu menit maaupun perkalian frekuensi sidang, biasa terdakwa tidak siap menghadiri sidang, atau mangkir sidang alasan sakit (stres dan lain-lain), hal ini yang meperlambat sidang sampai beberapa kali lamanya.

Durasi waktu, juga terjadi kalau persidangan online dalam setiap keputusan akhir tanpa ada sela waktu, kadangkala antar 10 menit sampai setengah jam, itu karena sidang kedua tidak ada sela putusan, maka hanya pembacaan amar putusan, dan tidak ada keberatan dari terdakwa. Maka dua kali sidang itu, yang sekali terakhir hanya formalitas saja, karena salinan putusan sidang pertama, baik dari tuntutan jaksa mauun putusanhakim dan ketua klop atau sama, maka, salinan putusan diserangkan lebih dahulu. Sedangkan putusan kedua (sidang kedua) hanya pembacaan Surat Keputusan Sidang dan Peenetapan pengasahan putusan, sekalian tanda tangan hakim dan anggota.

## **2. Efektivitas Persidangan *Online* dari Sisi Yuridis Formal Administratif**

Kebiasaan atau tradisi sidang online terjadi sebagai dampak Covid-19, karena keadaan luar biasa pengaruh pandemi, namun hal ini memberikan terobosan legislasi yuridis bahwa persidangan elektronik dianggap sebagai dasar pembaruan

prosedur administrasi persidangan di Indonesia, walaupun memiliki kendala tantangan besar dan proses prasidang dalam manajemen administrasi, kesiapan ahli tenaga administrasi pencatatan kasus, penerimaan berkas yang masih konvensional, masih cetak kertas, namun lambat laun mengalami perbaikan selama kurun waktu berjalan, dan bukti fisik *print-out* dikurangi semakin hari, sebagai langkah perbaikan administrasi fisik. Berdasarkan data umum waktu pendaftaran sidang tidak terlalu lama sekitar 1-2 jam sementara perbandingan pendaftaran manual langsung lebih lama, bulak-balik. Pengisian formulir pendaftaran, tergantung jaringan dan internet. Namun di perkotaan sebagai tempat Pengadilan Negeri Rantau, penyelesaian pendaftaran sidang berjalan cepat dan sesuai aturan. Yang membuat lambat adalah lampiran kesempurnaan pemberkasan.

### **3. Efektivitas sidang *online* dari sisi perbaikan SDM penegak hukum**

Perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum dari pemberkasan BAP (Berita Acara Perkara) pihak kepolisian, pihak jaksa penuntut, dan iha majlis hakim dan pencatata penitera, tetap memerlukan peningkatan keterampilan, skill, kemampuan pengetahuan teoritik, dan perceatan tanggap analisis, kritis, analitis kasus hkum dan penerapan asal, ayat kajian teoritik literatur hukum per-Undang-undang, serta peningkatan pengetahuan kecerdasan semua penegak hukum, termasuk pembahasan sidang yang lebih sedrhana rasional dan mudah aagar terdakwa memahami proses penerapan pasal tidak membingukan dan terkesan sangat sulit dalam pemahaman terdakwa. Dari sini diperlukan pendalaman kasus oleh setiap penegak hukum dan proses persidangan termask dari pihak pembela itu sendiri. Dari sisi SDM baik tenaga administrasi pendaftaran, hakim, jaksa, panitera,

sudah dipastikan 100 persen sarjana dan bahkan wajib S2 untuk Jaksa dan Hakim. Walaupun tenaga relawan honorer ada yang S1 dan SMA, itu tidak mengurangi sisi kekuatan SDM di tingkat perbaikan layanan persidangan dan percepatan proses persidangan yang berlangsung, terutama dari sisi penerapan pasal tuntutan dan ketelitian analisis hakim menjatuhkan vonis perkara. Dari sisi ini didapatkan ketepatan penerapan pasal rata-rata menjadi modus (tampilan terbanyak kasus percepatan dan efektivitas persidangan. Ketepatan penetapan pasal fokus dari (Sesuai, Sangat Sesuai/SS dan ada 3-4) dan dalam kasus langka, kasus khusus seperti ilegal logging atau illegal mining dan kasus membawa senjata tajam, sebagai contoh kasus prioritas dianggap memenuhi standar deviasi modus spesifik sebanyak 80-100% perkasus uniknya, dengan didukung pada penerapan pasal sangat efektif.

#### **4. Efektivitas Kelengkapan Digital dan Pembaruan Perangkat Pendukung**

Tradisi persidangan online dan digital selama Covid-19 memerlukan banyak persiapan, termasuk pembaruan perangkat kelengkapan fisik, seperti menyediakan CORNER persidangan, perangkat server, perangkat internet lengkap, monitor, penyimpanan data digital, jaringan yang tinggi, luas cakupan jaringan area, studio penerima dan pengirim data, video kamera digital, CCTV, digitalis otomatis, perekaman dan pendistribusian hasil persidangan, akurasi transparansi pemantauan legal formal yuridis, evaluasi setiap hasil jalannya persidang, dan segala yang rumit. Namun semua itu diperlukan pada tahap awal-awal, apabila sesudah berjalan lancar, maka sarana pendukung yang dipaparkan justru sangat membantu dan mempercepat kelancaran proses jalannya persidangan *online*.

Kelengkapan digital memang kewajiban yang disediakan oleh pihak pengadilan. Perangkat sempurna IPTEK menjadi bagian terdepan pembaruan persidangan *online*.

### **5. Efektivitas Pembiayaan, dan Penghematan Anggaran**

Persidangan digital atau *online* dianggap langkah maju, walaupun sebagai dampak langsung pandemi, namun dalam kaitan langkah perubahan mendasar ke arah legalitas perbaikan peradilan ke depan, maka dampak Efektivitas sangat signifikan, karena arah pembiayaan yang murah, mudah dan lebih terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan hukum. Dengan anggaran yang efisien tidak mengurangi rasa keadilan hukum itu sendiri. Berdasarkan semua kasus yang dijadikan sampel, efisiensi pembiayaan (SS= Sangat Sesuai/Sangat Setuju) dan 100% prosen efektif, serta didukung oleh personal pengadilan. Karenanya ada subsidi kasus dan bahan arsip fotocopian pendaftaran digratiskan bahkan dalam konteks biaya perkara setelah keputusan persidangan keluar.

### **6. Faktor Perubahan Pembaruan Permanen dan Keberlanjutan Persidangan *Online***

Perubahan dan pembaruan permanen dalam status pelaksanaan sidang *online* bukan saja sudah banyak saat ini dilakukan sebagai dampak pandemi, melainkan menjadi alternatif ke depan untuk perbaikan hukum dan pelaksanaan peradilan di Indonesia umumnya, khusus terhadap pelaksanaan peradilan di Pengadilan Negeri Rantau.

Perubahan pembaruan itu selain mengacu kepada proses edukasi hukum

peradilan dalam konteks pembelajaran kecerdasan penguasaan cepat terhadap literasi (aturan dan rujukan hukum) berdasarkan perundang-undangan yang tepat sasaran penegakkan hukumnya, penerapan pasal2 yang aplikatif, juga sebagai tuntutan yang tidak bisa ditawar2 dalam proses peradilan ke depan sebagai langkah maju dan mengikuti perkembangan Era *Disruption* (zaman digital teknologi industri generasi ke 4-5) bidang yang mesti dilakukan. Dampak endemi hanya antara yang mengilhami atau mengivovasi terjadinya perubahan dahsyat di dekade perubahan abad 21 ini.

Dampak luas pandemi di seluruh dunia tetap jadi momentum penting mengikuti perkembangan zaman ke depannya. Sebagai dampak seluruh kasus dalam persidangan dianggap memiliki rating 4 (100%), untuk keberhasilan pencapaian, sebagai sisi pembaruan persidangan Indonesia. Keberhasilan ini, mungkin sebagai prestasi tersendiri bagi pencapaian raihan contoh peralihan persidangan *online*.